

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692049/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
- 4. Kode/Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
- Sebesar : Rp. 2.449.007.000 (DUA MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.449.007.000
Rp. 2.449.007.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.449.007.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 2.449.007.000

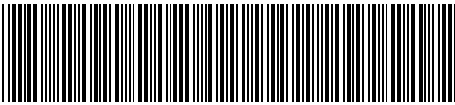
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3095-0239-5881-9806

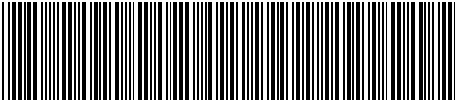
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						2.449.007.000	
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah						2.449.007.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah							
		2. 01	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan							
		3. 01	Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			4,00	layanan	1.518.315.000	
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			4.00	layanan	1.518.315.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga			1,00	Perkara	34.300.000	
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah			1.00	Perkara	34.300.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			9,00	Lembaga	870.782.000	
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah			9.00	Lembaga	870.782.000	
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			1,00	Laporan, Layanan	25.610.000	
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah			1.00	Laporan	25.610.000	

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2026
I B. SUMBER DANA



DS:3095-0239-5881-9806

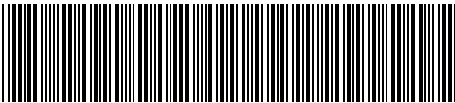
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.449.007.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

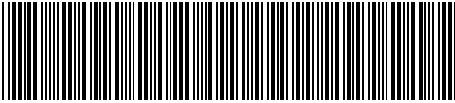


DS:3095-0239-5881-9806

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692049	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN	-	2.449.007	-	-	-	2.449.007	19 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.449.007	-	-	-	2.449.007		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.449.007	-	-	-	2.449.007		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	1.518.315	-	-	-	1.518.315		
04	PNBP	-	1.518.315	-	-	-	1.518.315		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	34.300	-	-	-	34.300		
04	PNBP	-	34.300	-	-	-	34.300		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	870.782	-	-	-	870.782		
04	PNBP	-	870.782	-	-	-	870.782		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	25.610	-	-	-	25.610	19 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3095-0239-5881-9806

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

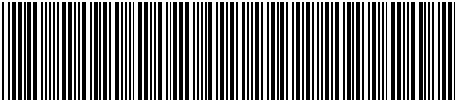
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	25.610	-	-	-	25.610	136	
JUMLAH		-	2.449.007	-	-	-	2.449.007		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3095-0239-5881-9806

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

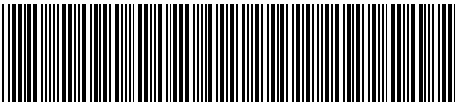
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692049	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	218.727	362.340	436.040	167.236	218.367	155.967	178.787	97.707	444.347	78.667	90.822	2.449.007
		BELANJA BARANG	0	218.727	362.340	436.040	167.236	218.367	155.967	178.787	97.707	444.347	78.667	90.822	2.449.007
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	218.727	362.340	436.040	167.236	218.367	155.967	178.787	97.707	444.347	78.667	90.822	2.449.007
135.04.BF.7110		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	218.727	362.340	436.040	167.236	218.367	155.967	178.787	97.707	444.347	78.667	90.822	2.449.007

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2026
IV A. B L O K I R



DS:3095-0239-5881-9806

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692049] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

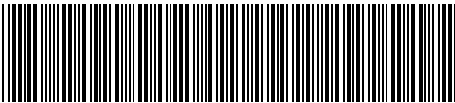
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2026
IV B. C A T A T A N



DS:3095-0239-5881-9806

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692049] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO